BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada UPD Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Dinas Sosial Banyuwangi berdiri untuk menindaklanjuti perlengkapan Perbub No. 51 dengan terbitnya UPD. Sejak itulah, Dinas Sosial Banyuwangi berdiri sendiri dan merupakan bagian dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) cabang Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur.

Untuk wilayah Jawa Timur, didirikan Departemen Sosial Daerah Banyuwangi yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi Kantor Departemen Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di Kabupaten/Kotamadya. Dan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

akhirnya menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2009 yang ditandai dengan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Banyuwangi tahun 2009. Pada tahun 2011, Dinsosnakertran kembali mengadakan UPD, yang mana bidang sosial dan kepahlawanan bergabung menjadi satu.

2. Letak Geografis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi beralamatkan di Jl. H.O.S. Cokroaminoto No: 30 Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

3. Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi

a. Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi, maka visinya adalah sebagai berikut: "Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Tenaga Kerja dan Transmigran yang Produktif, Kompetitif dan mandiri".

b. Misi

1) Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosia (PMKS);
2) Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan pelayanan ketenagakerjaan;

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) Meningkatkan kepesertaan, ketrampilan, produktivitas dan kemandirian transmigran

4. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi

a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1) Kepala Dinas.
2) Sekretaris.
3) Bidang Sosial.
4) Bidang Hubungan Industrial dan kepengawasan ketenaga kerjaan
5) Bidang Penempatan, petihan dan produktifitas
6) Bidang Transmigrasi.
7) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris, membawahi:

1) Sub Bagian Administrasi Umum dan kepegawaian.
2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3) Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Sosial, membawahi:

1) Seksi Bantuan sosial.
2) Seksi Rehabilitasi Sosial.
3) Seksi Nilai-nilai kepahlawanan dan PSKS

d. Bidang Hubungan Insdustrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

1) Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

e. Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktifitas

1) Kepala Seksi Pembinaan dan Penempatan

2) Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas

f. Bidang Transmigrasi

1) Kepala Seksi Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi

2) Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.

g. Jabatan Fungsional

1) Pengawas Ketenagakerjaan

2) Mediator hubungan Industrial

3) Pengantar Kerja

5. Tugas Pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi ;

a) Perumusan kebijakan tehnis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

b) Penyelenggaraan urusanpemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

a. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
4) Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
5) Melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksanan teknis Dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
8) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pengem-bangan karier;

9) Melaksanakana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi

b. Sekretariat memiliki tugas:

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum.

c. Sekretaris memiliki tugas:

1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas;

2) Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelak-sanaan tugas dan fungsi Dinas;

3) Menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ;

4) Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas;

5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas:
1) Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
3) Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
2) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris;
3) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
4) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas;

5) Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan Dinas;
3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Dinas;
4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

g. Tugas dan Fungsi Bidang Sosial

Bidang Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan bantuan sosial, merencanakan, mempersiapkan, menyusun dan menggerakkan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Beberapa tugas tersebut diantaranya:

1) Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan sosial;
2) Pelaksanaan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana;
3) Pelaksanaan pengurusan korban bencana;
4) Pemberian dan pengkoordinasian bantuan perlindungam sosial korban kekerasan
5) Pemrosesan rekomendasi pelaksanaan sumbangan sosial dan undian;
6) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
7) Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
8) Pengusulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
9) Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten;
10) Penggalian, pengembangan dan pendayagunaan PSKS;
11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

h. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja/buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja pada perusahaan.

i. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, informasi pasar kerja dan bursa kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan analisis jabatan, penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat karya, memfasilitasi pelatihan kerja dan pengelolaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standardisasi dan sertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.

j. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok di Bidang Ketransmigrasian. Adapun fungsi bidang Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Penyuluhan bidang transmigrasi;
2) Pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon transmigran;
3) Pengangkutan transmigran dari tempat asal sampai ke lokasi transmigrasi;
4) Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) tentang penyelenggaraan transmigrasi;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan proseduk ketentuan yang berlaku;
2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Perundang undangan yang berlaku;[76]

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil dari pedoman penyusunan proposal IAIN Jember, karena hal yang penting setelah membahas latar belakang adalah penyajian data dan analisisnya.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Strategi Komunikasi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, disajikan data-data tentang Strategi Komunikasi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kabat Kabupaten. Dinsonakertran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kabupaten Banyuwangi dengan membentuk beberapa program yang dilaksanakan oleh bagian Bidang Sosial Dinsosnakertran seperti yang

[76] Dinsosnakertran Banyuwangi, *Tugas pokok, Visi dan Misi Dinsosnakertran Banyuwangi tahun 2015*, http://www.Dinsosnakertran Banyuwangi.com/ppid/tupoksi-Dinsosnakertran-Banyuwangi/ (26 April 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diungkapkan oleh Sekretaris Dinsosnakertran, Bapak Megawan Mashari, yaitu:

> "Kita untuk mengentas kemiskinan, ditangani oleh bidang sosial. Biasanya mereka mengadakan penyuluhan sebelum melakukan beberapa pelatihan. Yang melakukan penyuluhan itu ya bidang sosial sendiri. Yang biasanya ditangani oleh bapak Asmai dan bu Tatik."[77]

Peneliti kembali mewawancarai tentang strategi komunikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menurut Bapak H. Asmai, S.AP selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial, yaitu:

> "programnya macem-macem mbak. Untuk pelaksanaan program, kita melakukan penyuluhan terlebih dahulu yang dilakukan oleh TKSK. TKSK itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, di mana mereka membantu bidang sosial di Dinsosnakertran ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat miskin mengenai bantuan yang akan dikerahkan. Jadi, TKSK itu tadi menghubungi kerawat Desa terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan kepada masyarakat miskinnya. Tapi, kegiatan itu, untuk Kecamatan Kabat masih belum tercakup. Kita memberikan bantuan untuk masyarakat miskin Kecamatan Kabat melalui bantuan dari pusat. Yang mana SKnya turun langsung dari pusat yaitu Program Keluarga Harapan. Kalau mbak Atus pengen tau tentang program tersebut, langsung saja datang di ruangannya mbak. Ruangannya itu di sebelah kanan dari ruangan pusat. Nanti mbak bertemu dengan mas Nandi selaku koordinator PKH. Kita membentuk koordinator PKH bertujuan supaya lebih mudah untuk menjalankan program ini. Ini juga tugas yang diberikan dari kemeterian sosial mbak, yang ada di pusat sana. Jadi memang peraturannya seperti itu. Kita hanya menjalankan tugas saja."[78]

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa untuk mensejahterakan masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi dibentuk

[77] Megawan Mashari, *Wawancara*, Banyuwangi, 20 April 2016
[78] Asmai, *Wawancara*, Banyuwangi, 21 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau biasa disebut dengan TKSK. TKSK inilah yang akan melakukan penyuluhan tentang program yang dicanangkan oleh Dinsosnakertran di setiap Kecamatan. Namun, untuk Kecamatan Kabat sendiri, Dinsosnakertran menjalankan tugas dari Kementerian Sosial pusat yaitu Program Keluarga Harapan. Hal ini dilakukan karena dana yang dimiliki Dinsosnakertran untuk menjalankan seluruh program sangat terbatas. Untuk menjalankan program ini, Dinsosnakertran membentuk koordinator dan pendamping dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial.

Setelah mendapat arahan dari kepala seksi bantuan, Peneliti kembali melakukan wawancara kepada informan yang berbeda tentang strategi komunikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi kepada Nandi Hendra Kusuma selaku Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:

> "menurut saya, strategi komunikasi kita untuk mengentas kemiskinan yaitu dengan cara memberikan penyuluhan kepada keluarga sangat miskin atau biasa kita sebut KSM yang dilakukan secara berkelompok. Tapi, yang terjun langsung untuk memberikan penyuluhan tersebut ada pendamping kita. Jadi, kita membentuk pendamping di setiap Kecamatan. Nah, pendamping itu tadi yang membantu kita untuk menyurvey KSM mbak dan sebagai penyampai informasi. Apakah keluarga tersebut benar-benar berhak untuk menerima atau tidak. Sedangkan Kecamatan Kabat sendiri memiliki 10 pendamping, tapi untuk sekarang tinggal 8 pendamping. Beberapa pendamping tersebut kita peroleh dengan cara perekrutan di setiap Kabupaten. Setelah merekrut beberapa pendamping, para pendamping itu harus mengikuti diklat untuk mengetahui tugas-tugas yang akan mereka kerjakan. Pendamping-pendamping itulah nantinya yang akan memberikan informasi tentang PKH kepada keluarga miskin tersebut. Jadi, setiap kali kita

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> melakukan pertemuan, yang menyampaikan informasi tentang PKH ya pendamping itu tadi mbak, nanti pendamping PKH di Kecamatan Kabat itu memberikan informasi kepada kita dalam bentuk laporan yang turunnya setiap tiga bulan sekali. Pendamping ini nantinya yang akan memberikan beberapa pesan atau informasi kepada KSM tentang pentingnya pendidikan, pentingnya kesehatan, kemudian tentang keguanaan PKH sendiri."[79]

Tidak jauh beda dengan informan lainnya informan bernama Anti Nurul Aini sebagai pendamping PKH kecamatan Kabat desa Pondok Nongko memberikan informasi tentang strategi komunikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah:

> "Langkah pertama kita menentukan siapa yang akan kita tuju dulu mbak. Yaitu dengan cara menyurvey keadaan ekonomi, rumah dan lain sebagainya sebagai mana informasi yang diberikan oleh BPS Banyuwangi. Jadi, kita nggak ujug-ujug memilih peserta PKH mbak. Setelah itu kita merencanakan apa yang akan kita sampaikan kepada peserta PKH dengan Koordinator PKH dan beberapa pendamping lainnya. Jadi, menurut saya strategi komunikasi yang kita lakukan dengan menentukan dulu siapa orang yang kita tuju, terus kita juga menentukan saja yang akan diinformasikan atau yang akan disampaikan mbak sebelum kita bertemu. Nah, informasi itu tadi, kita sepakati bersama sesuai dengan buku panduan pendamping PKH yaitu dengan memberikan pengertian PKH kepada penerima, terus kita juga memberikan informasi tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan, karena hal ini merupakan komponen penting di PKH. Jadi, kita juga harus merubah pemikiran mereka mbak. Agar mereka bisa menerima pesan yang kita sampaikan dan bisa merubah sikap mereka setelah melakukan pertemuan kelompok dengan kita. Oh ya, jadi kita para pendamping membentuk kelompok peserta PKH yang berjumlah 15-30 orang, yang nantinya kita melakukan pertemuan setiap bulan. Di pertemua kelompok itulah kita sampaikan seluruh informasi PKH dan kapa saja penyaluran dana PKH kepada para penerima bantuan itu."[80]

[79] Nandi Hendra Kusuma, *wawancara*, 21 April 2016
[80] Anti Nurul Aini, *wawancara*, Banyuwangi, 21 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada informan lain yaitu ibu Triana Widiarti sebagai salah satu pendamping PKH Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

> "pendamping PKH ini nggak cuma ngasih informasi tentang PKH aja mbak, tapi kita juga harus merubah mindset keluarga miskin tersebut. Karena apa mbak? Soalnya orang-orang desa itu jarang berfikir kalau sekolah itu penting, terus banyak juga yang bilang kalau percuma perempuan itu sekolah, toh akhirnya dia kerjanya di dapur Cuma masak. Bahkan mbak, banyak yang berfikir ibuk-ibuk itu gak usah melahirkan atau meriksakno kandungannya ke puskesmas atau bidan. Cukup datang ke dukun beranak sudah bisa melahirkan, soalnya di dukun beranak biayanya lebih murah. Dan lagi mereka pas sakit, kalau sakitnya nggak benar-benar parah tidak mungkin lari ke puskesmas atau dokter. Nah, disinilah peran pendamping sangat dibutuhkan mbak. Kita harus merubah mindset seperti itu. Agar mereka mau maju, artinya harus berubah menjadi lebih baik."[81]

Kemudian wawancara kembali dilakukan dengan informan yang berbeda, yaitu Keluarga Sangat Miskin (KSM) Desa Pondok Nongko Kecamatan Kabat tentang sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH, yaitu:

> "Kulo dereng nate mireng nopo niku PKH. Kulo ngertos PKH niki nggeh dugi Bu Anti niki. Bu Anti nyukani informasi PKH pas teng Kecamatan niku sareng kaleh tetanggi-tetanggi Pondok Nongko niki. Terus sien niku kulo kaleh tetanggi niku mboten mikir pentinge sekolah. Namine tiang mboten nggadah mbak, dados arto hang enten niki kulo ngge pados mangan sedintene."
> "saya belum pernah mendengar apa itu PKH. Saya mengerti tentang PKH ini ya dari Bu Anti ini. Bu Anti memberikan informasi PKH di kecamatan bersama dengan tetangga-tetangga Pondok Nongko ini. terus saya dan tetangga itu tidak pernah berfikir apa itu pentingnya sekolah. Namanya juga orang tidak punya mbak, jadi uang yang ada ini saya gunakan untuk mencari makan sehari-hari."[82]

[81] Triana Widiarti, *wawancara*, Banyuwangi, 25 April 2016
[82] Salatun, *wawancara*, Banyuwangi, 03 Mei 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan fakta-fakta dari sajian data ini, masih di analisis lagi sebagai berikut: Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalankan tugas dari kementerian pusat yaitu Kementerian Sosial untuk menjalankan Program Keluarga Harapan. Adapun dasar pelaksanaan PKH yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008, Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi /TKPKD", Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kota/TKPKD", dan Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

PKH langsung ditangani oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi dengan membentuk beberapa petugas yang ditempatkan di kantor Dinsosnakertran Banyuwangi. Petugas tersebut terdiri dari Koordinator PKH dan Operator PKH. Dalam menjalankan program ini, Koordinator PKH dibantu oleh pendamping yang ditempatkan di setiap Kecamatan salah satunya Kecamatan Kabat.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pendamping Kecamatan Kabat inilah yang mensosialisasikan tentang PKH kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Pendamping PKH yang dipilih diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan lokasi pelaksanaan PKH salah satunya yaitu Kecamatan Kabat (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini).

Adapun beberapa persyaratan untuk menjadi pendamping PKH yaitu warga Indonesia, usia pada saat mendaftar maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota/pengurus/partisipan partai/ anggota organisasi yang merupakan afiliasi dari partai politik, bersedia bekerja purna waktu (*full time*), dan memiliki kendaraan bermotor minimal roda dua.

Pendidikan pendamping PKH minimal D3 atau sederajat dari seluruh disiplin ilmu, dan yang memiliki latar belakang pendidikan Pekerjaan Sosial atau Kesejahteraan Sosial. Diutamakan memiliki pengalaman dalam Penanganan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Peserta PKH Kecamatan yang dituju adalah keluarga miskin yang terdaftar di data BPS Banyuwangi. Dari data tersebut, pendamping PKH melakukan pemutakhiran data di setiap rumah peserta PKH dan dengan cara penyuluhan melalui pemerintah Desa di Kecamatan Kabat. Karena, tidak semua masyarakat miskin di Kecamatan bisa menerima bantuan. Melainkan hanya beberapa masyarakat yang dikira berhak dan memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PKH. Adapun beberapa syarat menjadi peserta PKH yaitu Ibu hamil/ibu nifas/anak balita, anak berusia kurang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dari 7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra-sekolah), anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun. Penerima bantuan ini diberikan kepada ibu/nenek/saudara perempuan dari masyarakat miskin tersebut.

Pendamping memiliki tugas pokok yaitu mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan tentang PKH kepada penerima bantuan ini, yaitu Keluarga Sangat Miskin. Sosialisasi yang dilakukan oeh pendamping terlebih dahulu dilakukan di tingkat Kecamatan yaitu meliputi Koordinasi dan sosialisasi kepada pihak pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, RW, RT, dan tokoh masyarakat, Koordinasi dan sosialisasi kepada UPTD Kesehatan dan UPTD Pendidikan, dan Kantor Urusan Agama, serta melakukan sosialisasi tentang PKH kepada Masyarakat Kecamatan Kabat.

Setelah melakukan sosialisasi dengan pemerintah Desa, para pendamping menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH Kecamatan Kabat yang berjumlah sekitar 1500 Peserta untuk melakukan sosialisasi dan validasi data. Kemudian pendamping membentuk kelompok penerima bantuan PKH yang berjumlah 15-30 KSM Per Kelompok. Selain itu, pendamping PKH juga memfasilitasi peserta PKH untuk membentuk ketua kelompok peserta PKH dengan menjelaskan apa saja tugas ketua tersebut.

Selain melakukan sosialisasi, pendamping PKH ini juga harus merancang pesan atau informasi yang akan disampaikan terlebih dahulu

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yaitu penjelasan tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Jadi, mereka harus merubah mindset KSM bahwa sekolah itu penting untuk masa depan anak cucu mereka. Begitu pula dalam segi kesehatan, mereka harus bisa berfikir bagaimana akibatnya kalau meremehkan kesehatan seperti melahirkan di dukun beranak yang belum memiliki standard kesehatan. Selain itu, pesan yang disampaikan oleh pendamping PKH adalah tentang bantuan dana yang akan diberikan setiap tahunnya kepada peserta PKH.

Setiap pertemuan kelompok yang dilakukan satu bulan sekali, pendamping PKH mengkroscek apakah dana yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan di bidang kesehatan apakah digunakan untuk memeriksakan kandungan dan sebagainya. Selain itu, pendamping PKH di Kecamatan Kabat juga tidak pernah lupa untuk mengingatkan kepada ibu-ibu penerima bantuan untuk selalu memberikan semangat kepada anak mereka supaya rajin bersekolah.

Selain itu, tugas pendamping harus mampu merubah cara berfikir peserta PKH yaitu perubahan sikap peserta PKH yang mana mereka harus memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya sampai tingkat SMA atau sederajat dan memiliki kesadaran tentang pentingnya kesehatan janin yang ada dalam kandungannya atau kesehatan anak balitanya.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Dalam mengatasi sebuah masalah, sudah tentu lembaga memiliki beberapa program yang dijalankan. Begitu pula dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi. Setelah di atas membahas tentang strategi komunikasi yang ditetapkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, di bagian ini akan membahas tentang Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Megawan Mashari sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi, yaitu:

> "Untuk menangani masyarakat miskin kita membentuk beberapa program yang ditangani oleh bidang sosial. Mereka nanti membentuk program kemudian direalisasikan kepada masyarakat miskin di beberapa kecamatan. Kemudian bidang sosial memberikan laporannya kepada saya. Tapi, untuk program yang dibentuk oleh bidang sosial, belum mencakup ke seluruh kecamatan. Karena memang dana kita terbatas. Jadi, untuk semua kecamatan mendapatkan dana bantuan tunai masih Program Keluarga Harapan (PKH) saja yang jalan. Yang mana program itu SKnya turun langsung dari Kementrian Sosial pusat. Kenapa program kita belum mencakup seluruh masyarakat? Karena memang dana kita terbatas mbak. Untuk Dinsosnakertran ini sendiri hanya mendapatkan dana sebsar 9 milyar per tahun. Itu harus mencakup keseluruhan mbak. Artinya mulai dari bidang sosial, transmigrasi, menangani gepeng, dan lain sebagainya. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat miskin seperti yang mbak Atus

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

maksud tadi, kita masih menjalankan program dari Kemeneterian Sosial."[83]

Menurut Ketua Seksi Bantuan Sosial, Bapak H. Asmai, S. AP menjelaskan tentang program yang sudah berjalan di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya Kecamatan Kabat, adalah:

> "untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, kita membentuk beberapa program. Untuk Dinsosnakertran sendiri melaksanakan dua program dari pusat, artinya dari kementrian yang salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk program asli dari dinsos tersebut yaitu melakukan pelatihan bagi WRSE (wanita rawan sosial ekonomi), kemudian ada juga pelatihan las bagi mereka yang putus sekolah, pelatihan perbengkelan, pelatihan make up, dan pelatihan menjahit. Tapi, pelatihan-pelatihan tersebut lebih banyak terselenggara di Lapas Banyuwangi dan hanya beberapa Kecamatan, yaitu Giri, Glagah, Wongsorejo, dan Muncar. Sedangkan Untuk kecamatan Kabat, kita masih menggunakan bantuan dari PKH di mana bantuan tersebut turun dari pusat yaitu kementrian Sosial. Bantuan ini berupa bantuan tunai yang mana petugas PKH kita bentuk, kemudian koordinator tersebut dibantu oleh beberapa operator serta pendamping setiap Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. PKH ini memberi bantuan di dua komponen, yaitu komponen kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan, nifas dan balita agar mendapatkan gizi yang cukup. Dan untuk pendidikan, kita memberikan kepada Keluarga Sangat Miskin yang memiliki anak yang masih sekolah SD sampai SMA."[84]

Sama halnya menurut mas Nandi Hendra Kusuma sebagai Koordinator PKH Kabupaten Banyuwangi yang menjelaskan tentang pelaksanaan program PKH ini yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, adalah:

> "Jadi, PKH itu ada sejak 2009, itu yang di Kabupaten Banyuwangi mbak. Untuk Kecamatan sendiri sudah masuk dalam PKH sejak

[83] Megawan Mashari, *Wawancara*, Banyuwangi, 20 April 2016
[84] Asmai, *wawancara*, Banyuwangi, 21 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> tahun 2009. PKH membentuk beberapa petugas lapangan yaitu sekitar 10 yang kita sebut sebagai pendamping. Tapi untuk di kecamatan Kabat tinggal 8 pendamping. Jadi kita dapat data dari BPS Banyuwangi, kemudian para pendamping masing-masing kecamatan turun langsung ke lapangan artinya door to door menuju rumah masyarakat miskin tersebut untuk mensurvey, apakah benar, mereka tergolong masyarakat miskin dan bisa menerima bantuan PKH yang namanya validasi. Kan kita dapat data by name, by address, nama orang tua dan lainnya dan tempat tanggal lahirnya. Jadi kita harus cek satu persatu. Yang kedua kita ngecek komponen yang akan kita bantu. Nah, PKH ini kan membantu dalam komponen kesehatan dan pendidikan. Kalau bantuannya di dua item tersebut, jadi kita juga ngecek keberadaan komponen itu di keluarga yang bersangkutan. Untuk kesehatan, memberikan bantuan kepada ibu hamil dan balita. Sedangkan pendidikan, mulai SD sampai dengan SMP yaitu dari tahun 2009-2014, tapi untuk tahun lalu sudah bertambah sampai tingkat SMA. Setelah kita cek door to door, tapi kita juga tidak bisa sendiri, tapi juga harus bekerja sama dengan camat, kepala desa, dan lainnya. Nah, setelah kita peroleh data tersebut, kita kirim ke pusat. Ke pusat tersebut kembali di cek oleh pusat. Baru setelah itu, bantuan tersebut turun kepada masyarakat."[85]

Untuk mengetahui beberapa pelaksanaan program khususnya bantuan yang dikerahkan Dinsosnakertran Banyuwangi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kecamatan Kabat ini, peneliti kembali melakukan wawancara kepada informan yang berbeda yaitu Syafaatur Rohim selaku koordinator pendamping PKH Kecamatan Kabat, yaitu:

> "PKH ini memberikan bantuan kepada keluarga sangat miskin dengan komponen kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan meliputi ibu hamil, ibu nifas, menyusui, dan yang punya anak pra-sekolah yang menerima bantuan sebesar satu juta. Sedangkan untuk yang pendidikan untuk SD 450 ribu, SMP 750 ribu, dan SMA satu juta. Bantuan itu diterima pertahun. Sedangkan untuk bantuan tetapnya yaitu 500 ribu sedangkan untuk ibu hamil kita memberikan bantuan sebesar satu juta. Di sini untuk komponen kesehatan hanya terhitung satu mbak. Maksudnya, kalau di KSM

[85] Nandi Hendra Kusuma, *wawancara*, Banyuwangi, 21 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> tersebut punya dua anak balita, ya kita tetep ngitung satu. Kalau untuk anak sekolah kita hitung per kepala. Untuk penentuan keluarga sangat miskin sendiri kita peroleh data dari BPS Banyuwangi yang kemudian kita kroscek atau kita validkan istilahnya, dan jika memenuhi dua komponen tersebut, maka KSM ini berhak menerima bantuan."[86]

Selain koordinator pendamping PKH Kecamatan Kabat, peneliti juga melakukan wawancara kepada informan yang berbeda yaitu Ibu Anti Nurul Aini sebagai salah satu pendamping PKH Kecamatan Kabat tentang pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut:

> "jadi mbak, yang menerima bantuan PKH itu tidak semuanya bisa menerima. Hanya beberapa masyarakat miskin, misalnya ya, jika keluarga tersebut tercatat sebagai masyarakat miskin di BPS Banyuwangi, tapi tidak mencakup dua komponen tersebut, ya berarti dia nggak bisa menerima bantuan PKH. Terus bagi penerima PKH juga harus mematuhi peraturan yang ada. Kalau mereka tidak mematuhi, ya konsekuesinya harus dicabut dari penerima PKH. Terus, kita juga harus mengerti bagaimana kondisi psikologis keluarga miskin tersebut. Mereka kan berbeda dengan kita mbak, apa yang mereka fikirkan tidak sama. Kita dulu sebelum jadi pendamping, harus ikut diklat di Malang selama satu minggu. Dari situlah kita mengerti tugas utama para pendamping PKH."[87]

Penjelasan tentang pelaksanaan program yang dilakukan Dinsosnakertran Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi juga dilakukan oleh informan yang berbeda yaitu Muhan Arif sebagai salah satu pendamping PKH Kecematan Kabat Kabupaten Banyuwangi, adalah sebagai berikut:

> "Kita itu manjadi pendamping PKH dulunya ada informasi tentang pendaftaran pendamping PKH yang diturunkan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Banyuwangi. Katanya sih pendamping

[86] Syafaatur Rohim, *wawancara*, Banyuwangi, 21 April 2016
[87] Anti Nurul Aini, *wawancara*, Banyuwangi, 03 Mei 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> PKH itu tugasnya turun dari pusat. Hanya saja yang menajalankan Dinas Sosial tingkat Kabupaten. Di situ kita bertugas untuk mendampingi KSM Kecamatan Kabat ketika pengambilan bantuan tunai itu yang turun setiap tiga bulan sekali, terus juga mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok penerima bantuan PKH yang maksimal jumlahnya minimal 15 orang per kelompok juga memilih ketua kelompok, kita juga mempunyai tugas untuk melaporkan hasil kerja kita kepada koordinator PKH yang ada di kantor Dinas Sosial Banyuwangi. Tapi, laporannya itu tidak setiap bulan, satu tahun empat kali atau tiga bulan sekali mbak. Kalau mbak mau ikut waktu pendampingan, kita adakan setiap satu bulan sekali per kelompok itu. Terus selain itu, awalnya kita melakukan pemutakhiran data, soalnya data dari BPS harus kita lihat dulu dengan cara menyurvey langsung dari rumah ke rumah dan melalui kerawat desa setempat mbak."[88]

Agar data lebih kredibel, peneliti melakukan wawancara kepada penerima bantuan PKH Desa Pondoknongko Kecamtan Kabat Kabupaten Banyuwangi mengenai pengalokasian dana yang telah diterima. Apakah benar dana tersebut digunakan untuk biaya kesehatan dan pendidikan. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang bernama Ibu Mardiyah, yaitu sebagai berikut:

> "*Kulo ndamel dana niku nggeh sesuai kebutuhan niku mbak. Mboten kulo ngge lintune, biaya dingge lare sekolah nggeh kulo damel ngge tumbas buku, seragam, lan sepatu. Lek hang setunggale nggeh kulo ngge perikso teng Puskesmas mbak. Kulo mboten wanton ndamel bantuan niki ngge mbangun nggrio utawi tumbas hang macem*."
> "saya menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan itu mbak. Tidak saya gunakan untuk yang lainnya, biaya buat anak sekolah ya saya belikan buku, seragam, dan sepatu. Kalau yang satunya ya saya gunakan untuk periksa ke Puskesmas mbak. Saya tidak berani menggunakan bantuan ini untuk membangun rumah atau membeli macem-macem."[89]

[88] Muhan Arif, *wawancara*, Banyuwangi, 21 April 2016
[89] Mardiyah, *wawancara*, Banyuwangi, 03 Mei 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hal serupa juga diungkapan oleh informan lain yaitu Ibu Sulasiyah salah satu penerima bantuan PKH Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

> "Saya pakai untuk kebutuhan anak sekolah mbak. Kalau bukunya habis, ya saya belikan buku. Kadang juga aku gunakan untuk uang saku anak. Kan namanya anak kecil, kalau nggak ada sangu ya biasanya sulit disuruh sekolah. Saya juga bersyukur mbak, dengan adanya bantuan ini anak saya bisa sekolah mbak sampek SMA. Ya syukur-syukur kalau ada bantuan sampek anak menyelesaikan kuliah."[90]

Dari fakta-fakta hasil penyajian data di atas, masih dianalisis lagi sebagai berikut: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, Dinsosnakertran Banyuwangi melaksanakan program, di mana SK dari Program tersebut turun langsung dari Kementerian Sosial Pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti yang telah dipaparkan di atas.

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus tujuan PKH adalah meningkatkan kualitas kesehatan peserta PKH dan gizi ibu hamil, ibu nifas, balita, dan anak prasekolah Keluarga Sangat Miskin (KSM), meningkatkan taraf

[90] Sulasiyah, *wawancara*, Banyuwangi, 03 Mei 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pendidikan peserta PKH, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KSM. Dengan tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi peserta PKH.

Terdapat beberapa proses PKH yaitu seleksi dan penetapan lokasi PKH salah satunya Kecamatan Kabat, sosialisasi dan rapat koordinasi, rekrutmen dan rapat pendamping PKH, pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH, pembayaran pertama kali dan rekonsiliasi, verifikasi komitmen peserta PKH pada layanan kesehatan dan pendidikan, pembayaran berdasarkan verifikasi, bimbingan teknis, dan monitoring.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta PKH Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai Peserta PKH serta ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi dan Kementerian Sosial. Sasaran atau penerima bantuan PKH Kecamatan Kabat adalah Keluarga Sangat Miskin di Kecamatan Kabat yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada Keluarga Sangat Miskin di Kecamatan Kabat yang bersangkutan (jika tidak ada ibu, maka: nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan juga dapat menjadi penerima bantuan). Untuk itu, orang yang berhak mengambil bantuan adalah orang yang namanya tercantum di kartu PKH.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, maka akan menyekolahkan ana 7-15 tahun serta 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 12 tahun wajib sekolah, membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai prosedur kesehatan PKH bagi anak, dan untuk ibu hamil, nifas, dan menyusui harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur PKH bagi ibu hamil, nifas dan menyusui.

Terdapat beberapa komponen bagi penerima bantuan PKH adalah di bidang kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian intensif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan). Komponen kesehatan terdiri dari Ibu Hamil/Nifas, Anak usia di bawah lima tahun (Balita).

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan yaitu sebagai berikut:

a) Anak usia 0-6 tahun: bayi baru lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera setelah lahir, menjaga bayi tetap hangat, memberikan vit K, HBO, salep mata, dan konsling menyusui. Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak tiga kali dengan rincian pemeriksaan pertama pada usia 6-48 jam, kedua 1-7 hari, dan ketiga 8-28 hari. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG,

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan timbang berat badan secara rutin setiap bulan di posyandu. Ana usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 kali dalam satu tahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/ *early childhood education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

b) Ibu hamil dan ibu nifas: selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. Untuk ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Dan ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV, dan VI setelah melahirkan.

c) Anak dengan disabilitas: anak yang menyandang disabilitas dapat memeriksakan kesehatannya di dokter spesialis atau psikolog sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan.

Untuk komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatan angka partisipasi pendidikan dasar wajib sekolah 12 tahun

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

serta mengurangi angka pekerja anak pada KSM. Anak penerima bantuan PKH di Kecamatan Kabat berusia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan program dasar 12 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta OKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. PKH bukanlah pengganti program-program lainnya, melainkan PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

Peserta PKH komponen pendidikan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi persyaratannya yaitu:

a) Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-5 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar yaitu SD, SMP, dan SMP dengan mengikuti kehadiran kelas minimal 85% di hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung.
b) Apabila terdapat anak usia 5-6 tahun sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
c) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu memengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti SDLB atau SMPLB.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-21 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut untuk mendaftarkan di kesatuan pendidikan reguler atau no reguler.

e) Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remidial* yakni mempersiapkannya kembali ke kesatuan pendidikan. Program *remidial* ini adalah layanan rumah singgah atau *shalter* yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.

Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur. Adapun jangka waktu yang ditetapkan untuk menjadi peserta PKH yaitu selama 6 (enam) tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat, maka mereka harus keluar secara alamiah (*Natural Exit*). Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan resertifikasi.

Adapun kewajiban yang harus dipatuhi oleh peserta PKH Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a) Memeriksakan kandungan bagi ibu hamil ke fasilitas kesehatan sesuai protokol pelayanan kesehatan dasar
b) Melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu nifas sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar
c) Mengantarkan anak usia balita ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar
d) Mengantarkan anak usia pra-sekolah ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
e) Mendaftar dan menyekolahkan anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Adapun peserta PKH harus memiliki pengurus. Pengurus PKH adalah Ibu pengurus keluarga yang mengurus anak pada keluarga bersangkutan. Untuk pengurus keluarga dengan kondisi khusus, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a) Jika tidak ada ibu pengurus keluarga, maka wanita dewasa dari kerabat/keluarga yang mengurus anak keluarga tersebut seperti nenek/bibi/kakak perempuan dapat menjadi pengurus PKH.
b) Jika tidak terdapat wanita dewasa dari kerabat/keluarga yang mengurus anak keluarga tersebut, pengurus PKH dapat digantikan oleh kepala keluarga atau wanita dewasa lain yang mampu mengurus anak keluarga tersebut.

Di bawah ini merupakan Indeks dan komponen bantuan PKH tahun 2015 ditetapkan sesuai tabel berikut :

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 1
Indeks dan Komponen Bantuan PKH tahun 2015

Skema Bantuan	**Indeks Bantuan per-KSM/Tahun**
Bantuan Tetap	Rp 500.000,-
Bantuan Komponen PKH l. Ibu Hamil/Menyusui/Nifas/balita/anak pra- sekolah m. Anak SD dan Sederajat n. Anak SMP dan Sederajat o. Anak SMA dan Sederajat	 Rp 1000.000,- Rp 450.000,- Rp 750.000,- Rp 1000.000,-
Bantuan Minimun per-KSM	Rp 950.000,-
Bantuan Maksimum per-KSM	Rp 3.700.000,-

Sumber: Dokumentasi 2015
Buku Pedoman Program Keluarga Harapan
Banyuwangi, 21 April 2016

Dalam bantuan tersebut, untuk komponen kesehatan tidak dihitung berdasarkan jumlah anak balita tetapi menjadi satu paket dengan ibu hamil/nifas. Sedangkan untuk penerima bantuan komponen pendidikan, akan dihitung per kepala dan setiap KSM menerima bantuan tetap sebesar Rp 500.000,-.

Nilai bantuan yang diterima oleh peserta PKH untuk setiap tahunnya didasarkan pada jumlah komponen yang dimilikinya. Skema nilai bantuan untuk Peserta PKH yang memiliki satu komponen PKH. Apabila anggota peserta PKH melampaui jumlah yang disyaratkan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sebagaimana tabel diatas, maka jumlah bantuan maksimal yang diperoleh adalah Rp.3.700.000,-/tahun.

Adapun penerima PKH akan mendapatkan bantuan minimum sebesar Rp 950.000,- dengan rincian padatahap awal peserta PKH menerima bantuan sebesar Rp 112.500 kemudian di tahap kedua menerima Rp 112.500,- dan ditambah dengan bantuan tetap yang diterima setiap pencairan ditahap kedua dan akan menerima Rp 112.500,- di tahap detiga dan keempat.

Sedangkan untuk penerima bantuan maksimal adalah dengan hitungan setiap tahapan peserta PKH akan mendapatkan bantuan Rp 800.00,- dan menerima bantuan tetap di tahap kedua yaitu Rp 500.000,-. Jadi, jumlah bantuan maksimal yang diterima peserta PKH adalah sebesar Rp 3.700.000,- / Tahun.

Selain itu, penerima PKH juga akan mendapatkan sanksi jika peserta PKH tidak memenuhi komitmen seperti Komitmen komponen pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat kehadiran siswa di sekolah, yaitu minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulan. Sedangkan, komitmen komponen kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan protokol kesehatan.

Peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen pendidikan dan kesehatan dikenakan sanksi berupa pengurangan jumlah bantuan PKH, mengingat pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada Peserta PKH ditujukan untuk mengakses layanan pendidikan dan layanan kesehatan.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Ketentuan sanksi kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen adalah sebagai berikut :

a) Pengurangan bantuan sebesar 10% untuk setiap bulan bagi komponen PKH yang tidak memenuhi komitmen kehadiran.
b) Seluruh komponen PKH yang tidak memenuhi komitmen selama tiga bulan berturut-turut maka tidak dapat menerima bantuan pada tahapan bantuan tersebut.

Perhitungan pengurangan dan nilai bantuan untuk Peserta PKH, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2
Skema Pengurangan Bantuan

Komponen PKH	**Tidak Memenuhi Komitmen**		
	1 Bulan	**2 Bulan**	**3 Bulan**
Sebagian/tanggung renteng	10%	10%	10%
Seluruh Komponen	10%	10%	100%

Sumber: Dokumentasi 2015
Buku Pedoman Program Keluarga Harapan
Banyuwangi, 21 April 2016

Tanggung renteng adalah kondisi dimana terdapat salah satu Komponen PKH tidak memenuhi kewajiban sehingga berdampak pada status tidak komitmen untuk Komponen yang lainnya.

Tabel 3
Ilustrasi pengurangan nilai bantuan untuk komponen yang tidak komitmen seluruhnya.

Komponen	Bulan		
	Bulan -1	Bulan -2	Bulan -3
Bumil/Balita	X	X	X

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Anak SMA	X	X	X
Nilai Pengurangan	100.000	100.000	100.000
Total Pengurangan	Tidak mendapatkan bantuan		

Sumber: Dokumentasi 2015
Buku Pedoman Program Keluarga Harapan
Banyuwangi, 21 April 2016

Tabel diatas menunjukan semua komponen tidak memenuhi komitmen sehingga bantuan tidak diberikan. Illustrasi pengurangan nilai bantuan di atas merupakan gambaran penyaluran bantuan tahap ke-2 bagi Peserta PKH yang mendapatkan bantuan Rp.2.500.000/tahun.

Adapun keterangan di bawah ini mengenai tahapan penyaluran bantuan PKH adalah sebagai berikut:

1) Peserta PKH lama
   a) Bantuan diberikan kepada peserta PKH sebanyak 4 tahap dalam setahun.
   b) Khusus pada tahap II, selain mendapatkan bantuan berdasarkan komponen, peserta PKH juga mendapatkan bantuan tetap.
2) Peserta PKH baru
   a) Bantuan pertama kali diberikan kepada peserta PKH pada penyaluran tahap IV yang dilakukan pada bulan November atau Desember pada tahun berjalan.
   b) Pada penyaluran bantuan tersebut, peserta PKH mendapatkan ¼ dari total nilai bantuan pertahun, baik bantuan tetap maupun bantuan komponen.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adapun hasil rekap konsiliasi penyaluran dana tahun 2015 di Kecamatan Kabat tahap ke-4 terbagi menjadi 16 Desa yaitu Desa Bareng memiliki 46 KSM dengan jumlah 2 ibu hamil, 13 balita, 24 siswa SD, 22 siswa SMP, dan 1 siswa SMA dengan jumlah bantuan keseluruhan RP12. 075.000,-, desa Barong yang terbagi menjadi 95 KSM dengan rincian 7 ibu hamil, 19 balita, 73 siswa SD, 32 siswa SMP, 6 siswa SMA dengan jumlah bantuan keseluruhan Rp22.212.500,-, Desa Gombolirang yang terbagi menjadi 54 KSM dengan rincian 3 ibu hamil, 15 balita, 36 siswa SD, 21 siswa SMP, 5 siswa SMA dengan seluruh bantuan Rp13.737.000,-, desa Benelan Lor terbagi menjadi 19 KSM dengan rincian 4 ibu hamil, 17 balita, 53 siswa SD, 33 siswa SMP, 14 siswa SMA dngan seluruh bantuan Rp21. 025.000,-. Data tersebut merupakan data penerima PKH di beberapa Desa di Kecamatan. Untuk keseluruhan penerima PKH berjumlah 1473 peserta PKH dengan jumlah seluruh bantuan sebesar Rp389.000.000,-.

Sedangkan pelaksanaan program ini, Dinsosnakertran membentuk koordinator PKH yang ditempatkan di kantor Dinsosnakertran Banyuwangi. Struktur kelembagaan PKH Daerah Kabupaten/Kota yaitu tim koordinasi teknis PKH Kabupaten/ Kota, tim koordinasi PKH Kecamatan, Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten/Kota, unit pelaksana PKH Kecamatan.

Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan PKH. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota diperlukan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan program di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, tim koordinasi teknis PKH Kabupaten dibantu oleh tim koordinasi teknis PKH Kecamatan yang dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kecamatan terhadap pelaksanaan PKH. Tim Koordinasi Kecamatan diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan program di tingkat kecamatan.

Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten/Kota, terdiri dari Pengarah UPPKH Kabupaten/Kota (Kepala Dinas Sosial/ Institusi Sosial), Ketua UPPKH Kabupaten/Kota, Anggota Tim UPPKH Kabupaten/Kota, Koordinator Kabupaten/Kota, Operator PKH Kabupaten/Kota. Personil UPPKH Kecamatan terdiri dari Pendamping PKH. Jika dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu orang pendamping, maka ditunjuk satu orang sebagai Koordinator Kecamatan. Adapun nama-nama pendamping PKH Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi diantaranya Syafaatur Rohim sebagai Koordinator pendamping PKH Kecamatan Kabat dan anggotanya adalah Rini Munadiro, Triana Widiarti, Muhan Arif, Diah Nurkaeksi, Ali Mustakim, Uvi Kumalasari dan Anti Nurul Aini.

Adapun tugas rutin pendamping PKH yaitu Melakukan pemutakhiran data, Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

peserta PKH, memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi, melakukan kunjungan ke rumah Peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan atau yang tidak memenuhi komitmen.

Adapun aspek penilaian kinerja pendamping di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yaitu pelaksanaan kegiatan validasi data, pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data, pelaksanaan kegiatan verifikasi komitmen, pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan, pelaksanaan kegiatan pendampingan peserta PKH, melalui pertemuan kelompok (FDS), dan pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelaporan

Sedangkan aspek penilaian kinerja untuk Operator PKH yaitu Pelaksanaan kegiatan penerimaan dan entry data hasil validasi/pemutakhiran, pelaksanaan kegiatan Penerimaan dan entry data hasil verifikasi komitmen, pelaksanaan kegiatan Penerimaan dan entry data penyaluran bantuan, kegiatan pengelolaan dan penyediaan data PKH, kegiatan penerimaan dan pengiriman data ke UPPKH Pusat, pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelaporan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat validitas data hasil observasi, maka dalam analisis data berikut ini akan difokuskan pada strategi komunikasi yang ditetapkan Dinsosnakertran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dan Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

1. **Strategi Komunikasi yang ditetapkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi**

   Dari penyajian data dan analisis yang sudah dipaparkan oleh peneliti pada sub bab sebelumnya, maka peneliti menemukan beberapa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinsosnakertran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yaitu sesuai dengan kajian teori yang telah dipaparkan di bab dua dengan menggunakan teori Lasswell. Pada teori ini dijelaskan bahwa komunikasi akan efektif jika memenuhi beberapa unsur seperti siapa komunikatornya? Pesan apa yang disampaikan? Media apa yang digunakan? Siapa komunikannya? Efek apa yang diharapkannya?.[91]

   Untuk mensejahterakan masyarakat miskin di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, Dinsosnakertran menjalankan Program Keluarga Harapan sesuai dengan Surat Keputusan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim

[91] Effendy, *Dinamika*, 29.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008, Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi /TKPKD", Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kota/TKPKD", dan Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

Selain membentuk pendamping PKH, dinsosnakertran juga menentukan peserta PKH yang terdiri dari masyarakat miskin sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Banyuwangi. Masyarakat miskin yang masuk dalam data tersebut tidak serta merta langsung menjadi peserta PKH, tetapi di sini peran pendamping dibutuhkan yaitu untuk memutakhirkan data dengan cara mensurvey satu persatu masyarakat miskin tersebut, apakah mereka tergolong dalam persyaratan untuk menerima bantuan PKH. Adapun untuk Kecamatan Kabat terdiri dari 1530 KSM di tahun 2016.

Pendamping PKH juga harus membentuk beberapa kelompok dari peserta PKH yang terdiri dari 15-30 peserta yang tempat tinggalnya tidak berjauhan. Adapun tujuan dibentuknya kelompok adalah agar memudahkan para pendamping ketika melakukan pertemuan dengan peserta PKH.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam strategi komunikasi terdapat beberapa rumusan strategi yang bertujuan untuk menjaga kefektifan komunikasi, yaitu:

a. Menentukan Komunikator

Sesuai dengan teori di atas, Dinsosnakertran dalam strategi komunikasinya untuk menjalankan Program Keluarga Harapan yaitu dengan membentuk pendamping PKH yang bertugas sebagai komunikator atau pembawa informasi serta pesan dalam program PKH. Dinsosnakertran membentuk pendamping guna untuk mempermudah dalam penyampaian Program Keluarga Harapan kepada peserta. Dinsosnakertran memilih pendamping PKH yang telah lulus tes sesuai dengan peraturan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada Peserta PKH berdasaran kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu. Pendamping inilah yang menjadi fasilitator bagi peserta untuk mendapatkan hak-haknya seperti menerima pembayaran bantuan.

Dalam berkomunikasi, komunikator harus mengenal khalayak. Pendek kata pengenalan mengenai khalayak sangat diperlukan, dan hal ini hendaknya dilakukan melalui observasi, penjajakan atau penelitian. Di samping itu pengenalan mengenai khalayak dapat juga diperoleh melalui pendugaan-pendugaan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan teoritis mengenai manusia

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

baik sebagai makhluk biologik maupun sebagai makhluk sosial. Justru itu pengenalan mengenai manusia sangat diperlukan.[92]

Berdasarkan teori dan hasil analisis, sangat jelas bahwa seorang pendamping PKH terlebih dahulu harus mengerti bagaimana kondisi komunikan atau peserta PKH itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya pendamping PKH yang berdomisili Kecamatan Kabat ketika melaksanakan tugas sebagai pendamping PKH. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya pendamping mengerti kebutuhan peserta PKH dan dapat membantu peserta PKH memenuhi hak-haknya untuk memperoleh bantuan serta lebih mengenal karakter masing-masing peserta PKH yang didampinginya. Tidak hanya itu, Dinsosnakertran memilih pendamping PKH warga setempat dengan tujuan karena beberapa warga telah mengenal pendamping sehingga tidak ada kecanggungan untuk menceritakan seluruh keluhan atau kesulitan peserta kepada masing-masing pendamping. Dalam hal ini, strategi dengan mengenal khalayak sudah dapat dikatakan tepat sasaran dan berhasil.

b. Menentukan Komunikan

Sebuah komunikasi akan berjalan efektif jika di dalamnya terdapat beberapa unsur komunikasi yaitu salah satunya komunikan. Penentuan komunikan pada Program Keluarga Harapan yang dijalankan oleh Dinsosnakertran untuk meningkatkan kesejahteraan

[92] Fajar, *Ilmu Komunikasi*, 186.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

masyarakat di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan membentuk peserta PKH.

Peserta PKH merupakan keluarga yang dikategorikan sangat miskin sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Banyuwangi. Namun, tidak seluruh masyarakat miskin yang tercatat di data BPS Banyuwangi bisa dikategorikan sebagai peserta PKH. Karena untuk menjadi peserta PKH harus memenuhi beberapa syarat yaitu apabila dalam keluarga tersebut terdapat anak usia sekolah wajib 12 tahun (7-21 tahun) yang belum melanjutkan pendidikannya atau keluarga yang memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas/balita.

c. Menyusun Pesan

Selain memilih komunikator, Dinsosnakertran juga menentukan pesan yang harus disampaikan oleh pendamping PKH kepada peserta. Adapun proses menyusun pesan yaitu dengan menggunakan rumus AIDDA sebagai *adoption process,* yaitu *Attention, Interest, Desire, Decision,* dan *Action.* Artinya dimulai dengan membangkitkan perhatian, kemudian menumbuhkan minat dan kepentingan, sehingga khalayak memiliki hasrat untuk menerima pesan yang dirangsangkan oleh komunikator, dan akhirnya diambil keputusan untuk mengamalkannya dalam tindakan.[93]

[93] Ibid., 193.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adapun pesan yang disampaikan pendamping kepada peserta PKH adalah dengan membangkitkan perhatian berupa informasi dana bantuan dan waktu pengambilan dana bantuan. Setelah pendamping PKH membangkitkan perhatian, pendamping PKH menumbuhkan minat dan perhatian dengan cara perubahan sikap atau pemikiran peserta PKH yang menjelaskan betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka dan pentingnya kesehatan.

Pesan yang disampaikan kepada khalayak bisa dikatakan sebagian besar berisi seruan kepada RTSM untuk menyekolahkan anaknya kembali, mendapatkan pengobatan gratis. Di sini pendamping PKH berperan aktif sebagai pembawa pesan yang berisi tentang bantuan yang diterima oleh peserta, kewajiban peserta PKH, hak-hak yang dimiliki peserta PKH, dan beberapa sanksi apabila peserta PKH tidak melaksanakan kewajibannya.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh pendamping, pada prinsipnya sudah tepat karena dengan penyampaian pesan tersebut yang awalnya peserta PKH tingkat pengetahuannya masih rendah karena keterbatasan anggaran untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengingat biaya pendidikan yang begitu mahal, namun dengan pesan tersebut, peserta PKH berkemauan untuk melanjutkan pendidikan anaknya sampai tingkat SMA atau sederajat dan bersedia memeriksakan kesehatan balita maupun kehamilannya di layanan kesehatan setempat seperti Puskesmas atau bidan setempat.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d. Menetapkan metode

Adapun jenis komunikasi yang digunakan oleh Dinsosnakertran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Kabat kabupaten Banyuwangi yaitu komunikasi kelompok.

Komunikasi kelompok (*Group communication*) berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang.[94] Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinsosnakertran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi melaksanakan program yang mana Surat Keputusan (SK) turun langsung dari Kementerian Sosial pusat untuk menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk memberikan informasi mengenai PKH seperti bagaimana pencairan dana bantuan PKH, kegiatan apa saja nantinya yang akan dilaksanakan oleh seluruh peserta PKH, tugas apa saja yang harus dilaksanakan setelah resmi menjadi peserta PKH, pendamping PKH yang telah ditugaskan di Kecamatan Kabat membentuk beberapa kelompok peserta PKH. Kelompok ini beranggotakan 15-30 peserta PKH yang mana setiap kelompok akan mendapatkan satu pendamping. Pendamping inilah yang nantinya menjadi komunikator di setiap pertemuan.

[94] Onong, *Komunikasi*, 75

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hal ini dilaksanakan karena sebagian besar Peserta PKH mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan haknya sebagai peserta PKH maupun hak lainnya. Pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas-tugas UPPKH Pusat/Daerah dalam melakukan identifikasi dan melaporkan segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, serta untuk melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaiannya dalam waktu cepat. Dalam penentuan metode ini, komunikasi kelompok lebih sering digunakan di setiap kali pertemuan antara pendamping dengan peserta PKH.

Dari pengamatan terhadap pengembangannya, Dinsosnakertran sebagai salah satu lembaga pemerintahan mempunyai tugas untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik. Sejak awal hingga sekarang, maka konsep komunikasi pembangunan di sini berfungsi untuk memberikan perubahan pemikiran kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Komunikasi Pembangunan dapat dilihat dalam arti yang luas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dari proses perencanaan kemudian pelaksaan, dan penilaian terhadap pembangunan.[95]

Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinsosnakertran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Kabat tentu erat kaitannya dengan Komunikasi pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya beberapa program di Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan Kabat yang mendapatkan bantuan dalam bentuk Program Keluarga Harapan. Tujuan dilaksanakannya Program ini yaitu untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik, lebih mementingkan pendidikan serta kesehatan mereka serta bertujuan agar masyarakat miskin Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang telah disampaikan Dinsosnakertran Banyuwangi melalui para pendamping di Kabat.

Dalam komunikasi pembangunan telah dijelaskan bahwa komunikasi akan berlangsung secara efektif ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusannya. Hal ini telah diaplikasikan Dinsosnakertran dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin di Kecamatan kabat untuk berpartisipasi langsung dalam membuat keputusan seperti penempatan sekolah anak-anak mereka dan tempat

[95] Nasution, *Komunikasi Pembangunan*, 105.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ibu-ibu hamil atau melahirkan ketika memeriksakan kandungan dan anak balitanya ke posyandu.

2. **Pelaksanaan Program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi**

Pembahasan temuan tentang pelaksanaan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin oleh Dinsosnakertran di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menjalankan program dari Kementerian Sosial yang sesuai dengan peraturan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI yaitu Program Keluarga Harapan.

Sesuai dengan teori yang digunakan, masyarakat dikatakan sejahtera jika telah memenuhi kebutuhan primernya dalam segi pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Begitu pula dengan program yang telah dilaksanakan oleh Dinsosnakertran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Kabat adalah dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan, yang mana program ini memenuhi ketiga aspek sejahtera tersebut.

a. **Pendidikan**

Dari segi pendidikan, seluruh keluarga sangat miskin (KSM) yang memiliki anak usia sekolah wajib 12 tahun yaitu tingkat SD, SMP dan SMA, maka akan diberikan bantuan kepada KSM per tahunnya sebesar Rp 450.000,- untuk anak usia sekolah SD dan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sederajat, Rp 750.000,- untuk anak usia SMP dan sederajat serta Rp 1.000.000,- untuk anak usia SMA dan sederajat. Bantuan ini diberikan kepada KSM yang dihitung per kepala anak usia pendidikan wajib 12 tahun.

b. Kesehatan

Dari segi kesehatan, Dinsosnakertran mensurvey KSM yang memiliki wanita hamil atau balita akan diberikan bantuan sebesar Rp 1.000.000,- per tahun. Bantuan tersebut diberikan kepada ibu hamil/melahirkan/nifas/bagi yang memiliki balita. Dengan persyaratan agar ibu memeriksakan kehamilan dan balitanya ke posyandu.

c. Ekonomi

Dari segi ekonomi, seluruh KSM menerima bantuan tetap per tahun Rp 500.000,- yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini dapat membantu peserta PKH untuk memenuhi beberapa kebutuhannya. Dana bantuan tetap ini diberikan pada tahapan kedua setiap tahunnya.

PKH Kabupaten banyuwangi terlaksana di seluruh Kecamatan yang ada di Banyuwangi khususnya Kecamatan Kabat. Untuk melaksanakan program ini, Dinsosnakertran membentuk koordinator PKH, operator PKH dan pendamping PKH. Pendamping PKH di Kecamatan Kabat terhitung sebanyak 10 orang pada awal terbentuknya PKH, sedangkan sejak tahun 2015 hingga sekarang pendamping PKH

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hanya tersisa 8 pendamping untuk menangani 1530 KSM. Setiap pendamping memiliki tugas mendampingi sekitar 250 peserta PKH.

PKH memiliki pendamping yang bertugas untuk mendampingi masyarakat miskin dan membentuk kelompok serta ketua kelompok. Setiap kelompok berjumlah 15-30 peserta PKH yang tempat tinggalnya berdekatan serta memfasilitasi pemilihan ketua kelompok dengan menjelaskan tentang tugas dan peran ketua kelompok peserta PKH.

Untuk menjadi peserta PKH, terdapat beberapa persyaratan yaitu Keluarga Sangat Miskin yang sedang hamil/nifas/memiliki balita, memiliki anak sekolah SD, SMP atau SMA. Bantuan yang dikeluarkan berupa uang tunai dengan alokasi dana setiap tahun. Namun, untuk peserta lama PKH dilakukan pencairan dana bantuan secara 4 tahap dalam setahun dan khusus tahap kedua penerima PKH mendapatkan bantuan tetap per tahun sebesar Rp 500.000,-. Sedangkan penerima PKH baru, mendapatkan bantuan pertama pada penyaluran tahap IV yang dilakukan pada bulan November atau Desember pada tahun berjalan. Serta pada penyaluran bantuan tersebut, peserta PKH mendapatkan ¼ dari total nilai bantuan pertahun, baik bantuan tetap maupun bantuan komponen.

Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan yang dijalankan oleh Dinsosnakertran Banyuwangi ini, memberikan dampak yang sangat positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kecamatan Kabat di mana jumlah Keluarga Sangat Miskin Kecamatan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kabat Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan. Yang mana awal jumlah KSM di kecamatan Kabat sekitar 2000 dan untuk tahun terakhir ini yaitu di tahun 2016 turun menjadi 1530 KSM.

Hal tersebut ditandai dengan banyaknya anak usia wajib sekolah 12 tahun di Kecamatan Kabat mulai memasuki dunia sekolah. Mereka kembali memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan yang mana awalnya mereka tidak ada kemauan sama sekali untuk bersekolah karena faktor ekonomi keluarga serta kurangnya pemahaman tentang pendidikan. Tidak hanya itu, masyarakat Kabat juga mulai peduli untuk memeriksakan kandungannya dan bersedia melahirkan di UPTD kesehatan setempat seperti Puskesmas atau Bidan di sekitar Kecamatan Kabat.

Penurunan masyarakat miskin di Kecamatan Kabat juga ditandai dengan banyaknya KSM dinyatakan bebas dari bantuan PKH. Mereka dinyatakan bebas dari bantuan PKH jika sudah tidak memiliki anggota keluarga yang tergolong dalam dua komponen tersebut yaitu dari segi kesehatan (Ibu hamil/nifas/memiliki balita) dan pendidikan (Ibu yang memiliki anak usia wajib sekolah 12 tahun yaitu SD, SMP dan SMA).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id